

**PRAKTIK JURNALISME PERDAMAIAN DI MEDIA MASSA  
(ANALISIS NARATIF BERITA KERUSUHAN PASCA PENGUMUMAN HASIL  
PILPRES 2019 PADA HARIAN KOMPAS TANGGAL 21-25 MEI 2019)**

**PEACE JOURNALISM PRACTICES IN MASS MEDIA  
(NARRATIVE ANALYSIS OF POST- RIOT NEWS RELATED TO THE  
ANNOUNCEMENT OF 2019 PRESIDENTIAL ELECTION ON THE HARIAN KOMPAS  
21-25 MAY 2019)**

Tri Mardiana<sup>1</sup>, Djayeng Tirto S.<sup>2</sup>, Priza Audermando Purba<sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
([nanakecild@gmail.com](mailto:nanakecild@gmail.com), [djayengtirto@gmail.com](mailto:djayengtirto@gmail.com), [prizapurba@gmail.com](mailto:prizapurba@gmail.com))

**Abstrak** – Hubungan antara media massa dan konflik memang saling mempengaruhi. Media massa seringkali dianggap sebagai pemicu konflik melalui pemberitaan yang dilakukan. Pun dengan kerusuhan pasca pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2019 tanggal 21-22 Mei 2019 lalu turut menyita perhatian media massa di Indonesia. Begitu pula dengan Harian Kompas yang juga mengkonstruksi kerusuhan ini ke dalam pemberitaan. Harian Kompas termasuk dalam media massa nasional yang didirikan sebagai counter pers komunis kala itu dan saat ini menjadi *opinion leader* yang patut diperhitungkan. Menjelang Pemilu 2019, Harian Kompas memberikan perhatian dengan label Rumah Pemilu. Berita yang tertulis di media massa berarti ada narasi yang sedang disampaikan ke pada khalayak. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana Harian Kompas menyikapi jurnalisme perdamaian dalam pemberitaan kerusuhan tersebut. Rumusan masalah ini akan dijawab menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis narasi, wawancara, dan observasi. Dalam analisis naratif terlihat struktur pemberitaan, alur, unsur pertentangan, dan metafora-metafora yang muncul dalam narasi pemberitaan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Harian Kompas melaksanakan jurnalisme perdamaian dengan konteks untuk menjaga persatuan Indonesia. Harian Kompas menggunakan struktur pemberitaan yang dimulai dengan menyampaikan upaya resolusi konflik terlebih dahulu dan tidak menampilkan cerita konflik secara eksplisit. Konsep jurnalisme damai sebagai resolusi konflik bisa dilakukan dengan memberikan kebaruan di tataran organisasi media, konten media massa, dan unsur-unsur berita.

**Kata Kunci:** Harian Kompas, jurnalisme perdamaian, kerusuhan 21-22 Mei, konflik, dan media massa.

**Abstract** – *The relationship between mass media and conflict pivotally influence each other. The mass media are often seen as a trigger for conflict through the exposed news. The riots after the announcement of the 2019 Presidential Election results on 21-22 May 2019 also seized the attention of the mass media in Indonesia. Likewise, with Harian Kompas which also constructed this riot into the news. Harian Kompas was included in the national mass media which was established as a counter to the communist press at the time and is currently an opinion leader and should be taken into account. Ahead of the 2019 elections, Kompas paid attention to the Rumah Pemilu label. Based on this, the question arises on how Harian Kompas responded to peace journalism in reporting the riots.*

---

<sup>1</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Subsequently, what factors influence the implementation of peaceful journalism in the mass media and how the model of peaceful journalism is relevant if applied in the mass media in Indonesia become a question. The formulation of this issue uses qualitative research methods with narrative analysis techniques, interviews, and observations. The results obtained in the study show that *Harian Kompas* carries out peace journalism with a context to maintain Indonesia's unity. Peace journalism itself is influenced by freedom of the press, the vast growth of the media industry, the ability of journalists, guidelines for reporting on conflict, and the rise of social media. The concept of peace journalism as a conflict resolution can be done by providing novelty at the level of media organizations, mass media content, and news elements.

**Keywords:** *Harian Kompas*, peace journalism, riot 21-22 May, conflict, and mass media.

## Pendahuluan

Keterkaitan media massa dan konflik bukanlah hal yang baru. Kemampuan media untuk mempengaruhi opini publik merupakan unsur terbesar dalam korelasi media massa dan konflik. Fungsi media yang seperti ini menjadikan media massa mampu menjadi penyulut konflik. Keberadaan media massa yang menjadi provokator ini terjadi manakala media massa menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi tertentu. Namun di sisi lain, media massa sebenarnya dapat berperan sebagai resolutor konflik namakala menunjukkan kenetralan dan narasi damai di tengah proses konstruksi realitas.<sup>4</sup>

Dalam studi konflik, komunikasi menjadi unsur yang penting. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergen of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersamaan.<sup>5</sup> Persepsi ini muncul dari seseorang secara personal kepada orang tertentu yang biasanya terjadi akibat proses komunikasi yang telah terjalin. Persepsi kemudian berkembang menjadi sebuah opini yang melibatkan lebih banyak orang. Pada titik ini memunculkan potensi konflik antar

kelompok. Media massa turut berperan mendorong terjadinya konflik manakala perbedaan opini ini diangkat oleh media massa dan berkembang menjadi opini publik. Potensi konflik yang awalnya bersifat laten berubah menjadi konflik terbuka. Apalagi jika media massa dalam posisi berat sebelah atau mendukung salah satu pihak.

Salah satu contoh ketidakberimbangan media massa pada saat pemberitaan konflik dapat dijumpai pada konflik Maluku. Agus Sudibyo, Ibnu Hamad, dan Muhammad Qodari menemukan fakta bahwa pada konflik Maluku terdapat perbedaan mendasar antara media Islam dan media Kristen dalam liputan konflik. Media Islam lebih berani memberikan evaluasi-evaluasi yang menyiratkan prasangka negatif tentang kelompok Kristen sedangkan media Kristen sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus SARA (Suku, Agama, dan Ras Antar Golongan) bahkan cenderung menghindari penilaian langsung terhadap kelompok Kristen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya opini negatif yang dibangun oleh media Islam dengan cara menggunakan istilah-istilah konotatif, metafora, hiperbola, maupun menggunakan foto-foto untuk merekonstruksi kerusakan.

<sup>4</sup> A. Ranggabumi Nuswantoro, "Media Massa dalam Situasi Konflik: dari Bandwagon Effect sampai Peace Narrative", *Jurnal Komunikasi* Volume 1 no 6 edisi Januari 2013, hlm. 503-516

<sup>5</sup> Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Sementara media Kristen terkadang membela opini kelompok Kristen di Maluku meski dengan menggunakan bahasa yang implisit.<sup>6</sup>

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggiringan opini yang dilakukan oleh media seperti ini semakin memperuncing suatu konflik. Keberpihakan media massa terhadap kepentingan atau ideologi tertentu menjadi salah satu indikator bahwa media massa memberikan pengaruh terhadap suatu peristiwa konflik. Media tidak berdiri di posisi netral sehingga seakan-akan membenarkan opini yang beredar luas di masyarakat tentang prasangka buruk terhadap suatu kelompok. Hal ini sesuai dengan teori *agenda setting* bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak dengan isu-isu tertentu, bahkan sampai pada level penciptaan beragam pencitraan kepada publik.<sup>7</sup>

Selanjutnya, contoh lain dari pengkonstruksian realitas yang dilakukan oleh media terhadap konflik juga pernah diteliti oleh Mulharnetti Syas yang mengambil fokus penelitian konflik Indonesia-Malaysia. Subyek dari penelitian ini adalah surat kabar Harian Media Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif didapatkan hasil bahwa konstruksi realitas sangat mungkin dilakukan oleh media massa. Masyarakat menganggap bahwa apa yang disajikan oleh media massa adalah suatu kebenaran. Realitas tidak selalu dapat dilihat sebagai suatu fakta tetapi hasil dari ideologi media massa. Ini pula yang terjadi di Surat Kabar Media Indonesia. Pemberitaan konflik Indonesia-Malaysia

tidak disajikan sebagai satu paket fakta. Kenyataan dalam rangkaian peristiwa telah dimaknai oleh redaksi Surat Kabar Media Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam proses produksi berita, Media Indonesia terdapat praktik politik pemaknaan. Dimana dalam penyusunan berita selalu ada fakta yang ditonjolkan dan ada pula yang disembunyikan. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan pemilihan realitas yang ingin disajikan. Fakta yang terjadi di lapangan diinterpretasikan ke dalam bahasa yang sesuai dengan kepentingan media massa. Politik pemaknaan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa dipengaruhi ideologi oleh surat kabar itu sendiri.

Proses kerja jurnalistik tidak dapat dipisahkan dari pengaruh-pengaruh yang mengguncang kenetralan media. Salah satu pengaruh yang paling dominan adalah aktor besar kepemilikan media. Merujuk pada pernyataan James Watson, siapa yang dapat mengontrol proses komunikasi massa niscaya akan memiliki pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas. Pemilik media memanfaatkan efek ini agar memiliki pengaruh yang besar terhadap khalayak, sehingga kepentingan ekonomi dan politik seringkali dimasukkan dalam ranah kerja jurnalistik. Media massa pun menjadi bisnis besar yang menjanjikan.<sup>9</sup>

Sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi dan politik tertentu. Media massa disuguhkan dengan nuansa-nuansa teknologi,

---

<sup>6</sup> Agus Sudibyo, Ibnu Hamad, dan Muhammad Qodari, *Kabar-Kabar Kebencian. Prasangka Agama di Media Massa*, (Jakarta: ISAI, 2001)

<sup>7</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail buku 1 Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)

<sup>8</sup> Mulharnetti Syas, "Konstruksi Realitas Pemberitaan tentang Konflik Indonesia-Malaysia di Surat Kabar Media Indonesia", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 13 no 2, 2015.

<sup>9</sup> James Watson, *Media Communication: An Introduction to Theory and Process*, (London: Macmilan Press, 1996)

ekonomi, dan sosial di dalamnya.<sup>10</sup> Kompleksitas kepentingan yang mempengaruhi kenetralan media massa sebanding dengan meluasnya konflik di Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia jarang diakibatkan oleh satu sumber saja, namun kebanyakan berasal dari berbagai sumber. Dengan kata lain sumber ini merupakan kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai sehingga mengarah pada konflik yang terbuka. Dilihat dari sumbernya, konflik terbagi menjadi lima jenis yaitu konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik data, dan konflik hubungan sosial-psikologis.<sup>11</sup> Kelima jenis konflik ini apabila tidak dapat dipahami dan dicegah dengan baik maka akan mengarah pada tindakan-tindakan yang destruktif atau bernuansa kekerasan.

Saat menghadapi perselisihan, masyarakat Indonesia masih mengandalkan media massa sebagai sumber informasi yang akurat. Bagaimanapun juga, masyarakat masih menganggap media massa adalah sumber informasi yang dipercaya mampu menyajikan realitas di lapangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh media massa diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dalam press release yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada 14 Februari 2018 lalu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream meningkat. Hal ini selaras dengan hasil yang dilansir oleh Edelman Trust Barometer Global Report 2018 bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terhadap media sosial tergerus karena tingkat keakuratannya tidak menjadi prioritas.

Sebenarnya dalam menghadapi situasi konflik ada sebuah konsep yang disebut dengan jurnalisme perdamaian. Konsep jurnalisme perdamaian ini bisa diberlakukan oleh media massa agar konflik tidak meluas namun justru mengarah menuju perdamaian. Jurnalisme damai adalah praktik kerja jurnalistik yang berorientasi kepada masyarakat, fokus dalam pencarian berita dari berbagai perspektif dan akar permasalahan, serta menyampaikan berita secara jujur. Jurnalisme damai ini adalah cara untuk menurunkan ketegangan dalam konflik.<sup>12</sup> Jika melihat beberapa fakta empirik mengenai media massa dan konflik di Indonesia menunjukkan bahwa konsep jurnalisme damai ini belum dijalankan oleh seluruh media massa di Indonesia.

Jurnalisme damai sebenarnya bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apa manfaat dari adanya aksi kekerasan di dalam sebuah konflik. Lalu adakah hikmah dari konflik itu sendiri bagi entitas kemanusiaan. Jurnalisme damai menganggap bahwa konflik adalah ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Keberadaan jurnalisme damai di Indonesia seharusnya memiliki eksistensi yang tinggi jika mengingat Indonesia adalah negara multikultur yang memiliki tingkat kerentanan konflik tinggi. Begitu pun dengan sistem pemerintahan demokrasi di negara Indonesia yang mengharuskan adanya kontestasi politik secara regular untuk menentukan siapa pemimpinnya. Keberagaman dan demokrasi jelas menjadi dua hal yang dapat menjadi potensi konflik jika tidak dicegah sebaik mungkin.

Pada tahun 2019, Indonesia tengah menjalani hajatan besar berupa pesta demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu)

---

<sup>10</sup> D. Freedman, *The Politics of Media Policy*, (Cambridge: Polity Press, 1996)

<sup>11</sup> Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Gramedia, 2017)

<sup>12</sup> Jake Lynch & Annabel McGolrick, *Peace Journalism*, (Gloucestershire: Howthorn Press, 2005)

yang dihelat pada tanggal 17 April 2019 tersebut dirasa istimewa karena diselenggarakannya pemilu secara serentak untuk pemilihan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan Calon Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I, Daerah Perwakilan Rakyat tingkat 2, dan Dewan Perwakilan Daerah). Namun, agaknya isu pemilihan presiden jauh lebih populer di kalangan masyarakat dibanding pemilihan legislatif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan bahwa menjelang 40 hari penyelenggaraan Pemilu 2019, siaran televisi dan radio didominasi oleh tayangan tentang Pilpres 2019 bahkan mencapai angka 80% dari pemberitaan politik.<sup>13</sup>

Selama masa Pemilu 2019 memang terjadi tarik menarik yang sangat kuat kepada pers. Tak sedikit bermunculan media-media provokatif dengan misi dari kelompok tertentu. Pun dengan media-media yang hanya menebarkan sensasi dengan judul-judul bombastis. Hal tersebut tak lain untuk sekadar menarik perhatian pembaca dan mendulang keuntungan dari sana. Akhirnya, sebuah isu diberitakan secara tak berimbang, bahkan sampai memprovokasi masyarakat untuk menghakimi individu, kelompok, atau pihak tertentu. Akibatnya, masyarakat terseret dalam aliran cara pandang tak sehat, menuju kubangan gelap yang panas, penuh prasangka dan kebencian pada sesama, dan tak jarang berlanjut pada pertikaian, bahkan kekerasan dan perpecahan.

Faktanya, Pemilu 2019 memang diwarnai dengan sejumlah konflik. Puncaknya adalah kerusuhan yang terjadi

pasca pengumuman hasil Pilpres pada tanggal 21 Mei 2019. Kerusuhan ini ternyata mampu menyita perhatian seluruh media massa di Indonesia. Demonstran datang silih berganti yang membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus turun ke lapangan untuk menghalau kerusuhan aksi massa. Dalam tragedi kerusuhan ini, diduga terdapat delapan orang menjadi korban meninggal. Hingga saat ini pun siapa pelaku dan dalang dari kerusuhan ini masih tarik menarik dan belum diungkapkan secara gamblang oleh Polri maupun pemerintah.

Kerusuhan ini sebenarnya tidak serta merta terjadi begitu saja tanpa akar penyebabnya. Jika merunut secara historikal ke belakang, dominasi berita tentang Pilpres ini berbanding lurus dengan meningkatnya dinamika dukungan kepada Calon Presiden Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya sudah beradu di Pilpres 2014. Maka bukan hal yang mengherankan jika polarisasi pendukung semakin masif. Apalagi di Pilpres 2019 ini banyak dimainkan tentang isu politik identitas. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Politik identitas adalah konsep baru dalam ilmu politik yang mulai diterapkan setelah disimposiumkan pada pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun 1994.<sup>14</sup>

Pada saat pelaksanaan Pilpres 2019, konflik pun semakin memanas. Masing-masing pasangan calon saling klaim hasil

---

<sup>13</sup> RG, "Jelang Pemilu 2019, Televisi dan Radio Dominan Siarkan Isu Pilpres", dalam <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34998-jelang-pemilu-2019-televisi-dan-radio-dominan-siarkan-isu-pilpres>, 1 Mei 2019, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

<sup>14</sup> Ubed, Abdilah, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Indonesia: Penerbit Yayasan INDONESIAITERA, 2002). Hal 16

perhitungan suara dan kemudian berkembang dengan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon. Salah satu pasangan calon mengklaim bahwa data form C1 yang dimiliki salah satu paslon berbeda dengan milik KPU yang dianggap banyak kecurangan. Bahkan masalah perhitungan ini telah dibawa ke Bawaslu.

Puncak dari konflik Pemilu tahun 2019 ini ialah kerusuhan yang terjadi pasca pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019. Jika merujuk pada eskalasi konflik Glasl tahap konflik Pilpres 2019 ini telah mencapai tahap limited destruction dimana pihak yang berkonflik telah berani melakukan penyerangan-penyerangan yang berujung pada kekerasan. Kerusuhan awalnya hanya bermula di sekitar Gedung Bawaslu kemudian meluas ke beberapa titik yakni Tanah Abang, depan Gedung Bawaslu, dan Flyover Slipi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan aksi massa demo 22 Mei di gedung Bawaslu mulanya berlangsung kondusif. Bahkan dia mengatakan aparat dan peserta aksi sempat menjalan ibadah shalat Tarawih berjemaah. Lantas, sekitar pukul 21.00 WIB, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau massa aksi membubarkan diri. Massa pun patuh dan membubarkan diri secara kondusif.<sup>15</sup>

Kemudian tiba-tiba pukul 23.00 WIB, di depan Gedung Bawaslu muncul kelompok massa yang tak jelas asalnya. Kelompok ini melakukan tindakan anarkis dan provokatif. Mereka berusaha merusak security banner dan memprovokasi petugas. TNI dan Polri berusaha menghalau massa namun berujung pada penyerangan kepada petugas dengan menggunakan ucapan

verbal, lemparan batu, bom molotov, dan petasan ukuran besar. Baru sekitar pukul 02.45 WIB polisi bisa mengurai kelompok massa. Setelah 58 orang terduga provokator diamankan, sekitar pukul 03.00 WIB muncul lagi massa tak dikenal di sekitar Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menduga kelompok massa ini sudah disetting karena kelompok massa justru menyerang asrama Polri dengan batu, bom molotov, petasan, dan botol.

Dari aksi massa ini, diketahui orang-orang dari bagian kelompok massa mengalami luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Di satu sisi, beberapa kendaraan dilaporkan rusak. Kejadian ini pula membuat keresahan seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di Jakarta pasalnya bentrokan ini berimbas pada anarkisme hingga ke penjarahan di Tanah Abang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan libur untuk segala aktivitas perkantoran dan perdagangan di Jakarta. Tentu, demonstrasi yang berujung kerusuhan ini mendapat perhatian khusus bagi seluruh media massa tanah air. Bahkan beberapa saluran televisi memberikan waktu khusus untuk penayangan live report maupun live CCTV beberapa titik bentrok di Jakarta.

Seluruh media massa pun memberitakan peristiwa kerusuhan ini dengan berbagai perspektifnya masing-masing. Salah satu yang menarik perhatian peneliti adalah headline Harian Kompas yang memberikan judul besar “Jokowi: Mari Kita Bersatu” dan dilanjutkan berita di halaman selanjutnya dengan judul “Polri Jamin Keamanan Masyarakat” pada surat kabar edisi 22 Mei 2019.

---

<sup>15</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Yang Perlu Diketahui Seputar kerusuhan 21-22 Mei Sejauh Ini”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4561198/yang-perlu-diketahui-seputar-kerusuhan-21-22-mei-sejauh-ini>, 22 Mei 2019, diakses pada tanggal 27 Mei 2019.

Surat kabar yang terbit harian akan memberitakan berita yang terjadi selama 24 jam sebelumnya. Sehingga peristiwa aksi masa tanggal 22 pun ditayangkan pada surat kabar 23 Mei 2019 dengan headline “Indonesia Rumah Bersama” dan berita pada halaman yang sama yakni “Kemanusiaan: Mereka yang Gigih Memberikan Pertolongan”. Hal ini mengingatkan peneliti pada jurnalisme perdamaian yang menjadi senjata bagi jurnalis dalam memberitakan konflik.

Kompas adalah sebuah media massa nasional yang awalnya bermain di ranah media cetak. Kompas pertama kali terbit pada tanggal 28 Juni 1965. Meski bukan koran tertua di Indonesia, namun kiprah Kompas perlu diperhitungkan secara practical maupun teoritical. Pasanya, Kompas mampu menjadi opinion leader dengan jumlah pembaca sebanyak 751.000 berdasarkan hasil survei kuartal III tahun 2017 yang dilakukan oleh Media View (CMV). Meskipun jumlah pembaca tertinggi masih dipegang oleh Jawa Pos yang selisih 91.000 lebih banyak dari Kompas. Namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Kompas mendapatkan penghargaan sebagai Media Cetak Berdedikasi dalam Bahasa Indonesia pada tahun 2018. Penghargaan ini diberikan kepada media cetak yang sudah memperoleh peringkat pertama minimal 3 kali dalam penilaian penggunaan bahasa Indonesia.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa track record Kompas sebagai media cetak patut untuk diapresiasi.

Kemudian, di kontestasi politik 2019 Kompas secara tegas memposisikan diri

sebagai media massa yang siap mengawal Pemilu 2019 melalui program Rumah Pemilu. Salah satu klaim Kompas dalam mengawal Pemilu 2019 ini ialah bagian Penelitian dan Pengembangan Kompas akan melakukan analisis secara akurat, independen, dan tepercaya sebelum menyampaikan data kepada masyarakat. Keberadaan Rumah Pemilu ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pilar keempat demokrasi dan wujud jurnalisme presisi untuk mengawal pemilihan umum 2019.<sup>17</sup>

Beberapa keunggulan Kompas ini membuat peneliti ingin mengulik lebih jauh tentang berita yang diproduksi oleh Harian Kompas khususnya berita kerusuhan tanggal 21 Mei yang terbingkai dalam judul yang cukup menggelitik peneliti. Eriyanto menyebutkan bahwa media dalam proses produksi berita akan memilih realitas mana yang diambil termasuk pula aktor siapa yang akan menjadi sumber berita. Sehingga dapat dikatakan bahwa media untuk mendukung penonjolan sisi berita diperlukan kecermatan dalam memilih sumber berita.<sup>18</sup> Banyak penelitian yang mengulik sisi pemingkai berita namun tidak pada ranah teks berita itu sendiri. Padahal dalam jurnalisme perdamaian, parameternya tidak hanya aspek pemingkai berita namun juga bagaimana jurnalis melahirkan makna teks melalui penggunaan kata, bahasa, dan metafora-metafora pada berita yang diproduksi.

Oleh sebab itu, untuk melihat makna teks diperlukan metode analisis yang dinamakan dengan analisis naratif.

---

<sup>16</sup> Ichwan Chasani, “Koran Warta Kota Raih Peringkat 7, Media Cetak Berbahasa Indonesia Terbaik 2018”, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/10/koran-warta-kota-raih-peringkat-7-media-cetak-berbahasa-indonesia-terbaik-2018>, 10 Desember 2018, diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

<sup>17</sup> Kompas, “Kompas TV Harian Kompas Kompas Com Luncurkan Rumah Pemilu”. dalam <https://www.kompas.tv/article/30174/kompastv-harian-kompas-kompas-com-luncurkan-rumah-pemilu>, 1 Agustus 2018, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

<sup>18</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. (Yogyakarta: LKis, 2002)

Analisis naratif ialah sebuah alat analitis untuk melihat teks berita sebagai sebuah cerita dan dongeng. Berita merupakan suatu narasi yang memenuhi syarat, yakni merupakan rangkaian peristiwa, memiliki jalan cerita atau logika tertentu, dan tidak serta merta sebagai sebuah copy paste dari sebuah realitas. James Carey mengatakan bahwa berita tidak hanya menyampaikan informasi namun juga sebagai sebuah drama. Berita adalah proses simbolis dimana realitas diproduksi, diubah, dan dipelihara. Carey juga menjelaskan bahwa berita bukan produk informasi yang berjalan secara statis namun justru dinamis, sehingga berita harus dilihat sebagai narasi yang mengacu kepada nilai dan makna tertentu.<sup>19</sup> Dalam analisis teks tidak terlepas pada 3 hal yakni teks, produksi teks, dan sosio cultural teks dimana ketiganya ini harus didukung dengan metode penelitian lain untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

Berita yang dianalisis dibatasi hingga tanggal 25 Mei 2019, tepat 1 hari setelah aksi 24 Mei 2019 di depan Kantor Bawaslu. Untuk itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat melihat lebih dalam bagaimana jurnalisme perdamaian dipraktikkan oleh Harian Kompas dalam memberitakan kerusuhan pasca pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU tanggal 21 s.d 25 Mei 2019 dengan menggunakan pendekatan analisis naratif.

**Tabel 1.** Pemberitaan Kerusuhan 21-22 Mei di Harian Kompas

No	Edisi	Judul	Letak
1.	21/5	Rekapitulasi Pemilu Tuntas	Headline (hal 1)
2.	21/5	Pemilu 2019: Patuhi Hukum dan Jaga Persatuan	Hal 1 kol 4

3.	21/5	Pemilu 2019: Daerah Basis Jadi Fokus Kampanye	Hal 2 kol 2
4.	22/5	Jokowi: Mari Kita Bersatu	Headline
5.	22/5	Polri Jamin Keamanan Masyarakat	Hal 3 Kol 1
6.	22/5	Pemilu 2019: Empat Laporan Pelanggaran Ditindaklanjuti	Hal 3 Kol 2
7.	23/5	Kemanusiaan: Mereka yang Gigih Memberi Pertolongan	Hal 1 kol 1
8.	23/5	Indonesia Rumah Bersama	Headline
9.	23/5	Demonstrasi Hasil Pemilu: TNI/Polri Amankan Situasi di Jakarta	Hal 1 Kol 5
10.	23/5	Cegah Hoaks, Media Sosial Dibatasi	Hal 2 Kol 1-6
11.	23/5	Demo Hasil Pemilu: Aksi di Sejumlah Daerah Berlangsung Aman	Hal 2 Kol 1-5
12.	23/5	Sengketa Mulai Diajukan	Hal 4 Kol 2
13.	24/5	Jaga Suasana Damai	Headline
14.	24/5	Unjuk Rasa: Tatapan Sendu dari Tanah Abang	Hal 1 Kol 4
15.	24/5	Demo Hasil Pemilu: Kelompok Radikal Diduga Susupi Perusuh	Hal 1 Kol 7
16.	24/5	Kerusuhan dan Demokrasi	Hal 2 Kol 3
17.	24/5	Pencegahan Hoaks:	Hal 4

<sup>19</sup> Eriyanto, *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)

		Dibutuhkan Solusi Jangka Panjang	
18.	25/5	MK Kembali Jadi Penentu	Headline
19.	25/5	Senangnya Tanah Abang Kembali Lancar	Hal 1 Kol 3
20.	25/5	Polisi Investigasi Video Penganiayaan	Hal 2 Kol 1
21.	25/5	Permohonan Sengketa Pileg Menurun	Hal 3 Kol 1

Sumber : diolah peneliti (2019)

Hasil dari analisis narasi ini kemudian diperdalam dengan menggunakan teknik wawancara dengan berbagai narasumber baik dari redaksi Harian Kompas maupun dari stakeholder yang memiliki perhatian terhadap pers seperti Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Persatuan Wartawan Indonesia ataupun Aliansi Jurnalis Independen. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang jurnalisme perdamaian dan diharapkan mampu melahirkan model jurnalisme perdamaian yang relevan untuk diterapkan oleh seluruh media massa di Indonesia.

### Metode Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif terjadi karena adanya perubahan paradigma atas suatu realitas yang muncul di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Moleong (2007) bahwa metodologi kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada kata-kata yang tertulis maupun secara lisan dari tindakan

bisa yang dilihat.<sup>21</sup> Sumber-sumber data didapatkan dengan cara mengumpulkan fenomena-fenomena sebagai data penelitian, kata-kata yang ditemukan dalam pemberitaan melalui analisa naratif dan dilanjutkan dengan mengumpulkan hasil wawancara yang menunjukkan adanya perubahan realitas dari fakta di tengah masyarakat menjadi realitas yang dibentuk pemberitaan di media. Pemilihan pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk membedah praktik jurnalisme perdamaian pada pemberitaan kerusuhan pasca pengumuman hasil perhitungan Pemilu 2019 karena akan memaparkan data yang jelas termasuk pula data hasil wawancara bersama pakar.

### Narasi dan Makna Teks

Pada analisis narasi terdapat struktur narasi secara umum yang terdiri dari ekuilibrium (keseimbangan) menuju gangguan (kekacauan) dan terakhir ekuilibrium (keseimbangan). Tony Thwait menjelaskan bahwa pembuat berita ketika memberitakan suatu peristiwa akan menyesuaikan ke dalam kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat. Lacey juga berpendapat bahwa berita di media massa mengikuti kaidah struktur narasi.<sup>22</sup>

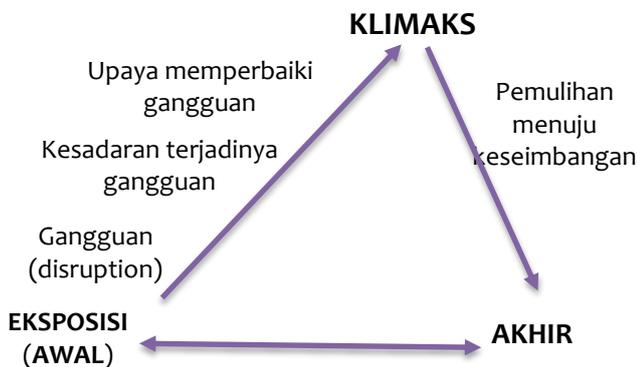
Teks berita ditandai oleh adanya gangguan (*disruption*) atau konflik. Gangguan atau konflik tersebut dalam berita disebut dengan nilai berita. Berita bisa jadi hanya sampai pada tahap gangguan saja. Namun struktur narasi berita secara umum digambarkan bahwa setelah ada gangguan adalah adanya kesadaran terjadinya gangguan dilanjutkan upaya memperbaiki gangguan hingga menuju klimaks.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>21</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

<sup>22</sup> Eriyanto, *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

Setelah itu ialah pemulihan menuju keseimbangan dan penyelesaian akhir.



**Gambar 1** Struktur Narasi Berita

Sumber : Adaptasi dan dikembangkan dari Graeme Burton, *Taking Television: An Introduction to the Study of Television*, London: Arnold (2000).

Dalam analisis teks berita bisa jadi penyelesaian dari suatu peristiwa menjadi awal dari masalah baru. Ini pula yang menjadi perbedaan antara teks narasi fiksi dan teks berita. Dalam narasi fiksi cerita berakhir setelah misi tercapai kemudian keseimbangan dapat diciptakan kembali. Sebaliknya dalam narasi berita, penyelesaian dari suatu peristiwa bisa menjadi awal dari gangguan baru.

Dalam memahami makna teks diperlukan analisis dengan melihat teks yang terdapat dalam berita. Eriyanto pun memberikan konsep bahwa di dalam narasi terdapat karakter dan oposisi berlawanan. Dimana kedua hal ini dapat diidentifikasi melalui penggambaran yang dilakukan oleh jurnalis. Termasuk pula dalam pemberitaan konflik, pasti akan ada 2 terminologi maupun tindakan yang saling berlawanan. Untuk itu, penggambaran dua hal yang berlawanan ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.** Damai Vs Konflik dalam Narasi

DAMAI	KONFLIK
Bersatu	Rusuh

Bekerja-sama	Bersaing
Sehat	Terluka
Membela	Menyerang
Mengungkapkan	Berpura-berpura
Melindungi	Mengancam
Menemukan	Kehilangan
Menyelamatkan	Menculik/melukai
Jujur	Berbohong
Mengatasi kejahatan	Melawan pemerintah
Menolong korban	Membuat kejahatan
Mengatasi kekacauan	Membuat kekacauan
Kebebasan	Penjajahan
Adil	Curang

Sumber : Eriyanto (2007) Diolah peneliti

### Jurnalisme Perdamaian sebagai Resolusi Konflik

Ide pelibatan media massa dalam proses resolusi konflik belumlah begitu populer, namun bagaimana pengaruh media massa terhadap masyarakat tidaklah terbantahkan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan dalam upaya resolusi konflik ini adalah pendekatan jurnalisme damai yang digagas oleh Johan Galtung dan berkembang dengan berbagai definisi hingga sekarang ini. Jurnalisme perdamaian ini muncul sejak pertengahan tahun 1990an sebagai bidang baru dalam *Peace and Conflict Studies*. Jurnalisme perdamaian ini menawarkan baik bentuk analisis kritis pelaporan konflik yang ada dan serangkaian rencana dan opsi untuk jurnalis. Sehingga jurnalisme perdamaian tidak hanya berarti melaporkan perdamaian tetapi bagaimana menerapkan wawasan dari studi perdamaian dan konflik yang terdiri dari apa yang diketahui dan diamati dari konflik, dinamika, potensi, dan transformasi dituliskan dalam laporan berita.<sup>23</sup>

Dalam tulisan Jake Lynch and Annabel McGoldrik mengikuti pendapat

<sup>23</sup> Jake Lynch, "A Course in Peace Journalism", *Conflict & Communication Online*, Vol.6, No. 1, 2007.

asli Johan Galtung. Johan Galtung berpendapat jika jurnalis yang meliput perang dan konflik dapat membantu proses mengembalikan perdamaian dan dialog. Cara yang dilakukan jurnalis tidak hanya menyampaikan kebenaran namun juga dengan mengurangi fokus pada kekerasan, jumlah korban, dan mesin pembunuh. Para jurnalisnya fokus pada dampak perang pada kehidupan orang-orang.

Lynch dan McGoldrick juga menjelaskan bahwa perlu ada “penjangkaran” untuk editor dan reporter. Ketika meliput berita, jurnalisme perdamaian ini harus dapat menemukan beberapa hal untuk membantu proses resolusi konflik. temuan kunci ini meliputi:

1. Kekerasan tidak pernah sepenuhnya menjadi penyebab suatu konflik. konflik bisa saja disebabkan oleh dari struktur, budaya, dan proses tertentu. Sehingga aspek historis harus ditemukan.
2. Respon non kekerasan pasti selalu mungkin terjadi. Ada beberapa cara untuk merespon konflik. Ini pula yang dilakukan oleh beberapa orang di beberapa tempat untuk merancang, mengadvokasi, dan menerapkan upaya perdamaian berbasis non kekerasan.
3. Dalam sebuah konflik, selalu ada lebih dari dua pihak yang terlibat. Beberapa mungkin memiliki minat atau keterlibatan terhadap konflik secara tersembunyi. Untuk itu perlu dibuat pemetaan konflik yang disajikan sebagai tambahan analisis.
4. Setiap pihak yang berkonflik pasti memiliki tujuan dan taruhan. Sehingga pihak-pihak ini harus dilihat apa saja yang menjadi kepentingannya.

Berkembangnya konsep jurnalisme damai didasarkan pada penawaran

bahwa membekali reporter dengan keahlian resolusi konflik akan memungkinkan reporter tersebut menjadi profesional yang lebih efektif. Sehingga jurnalisme damai berusaha menampilkan pembingkai narasi cerita dan penggambaran yang lebih luas, adil, dan akurat dalam memahami proses transformasi konflik. Lynch merumuskan bahwa terdapat tiga bagian utama dari diskursus jurnalisme damai. Pertama, proporsi konflik. Kedua adalah segitiga berita, jurnalisme, dan media. Ketiga adalah tentang media analisis dan media kritis yaitu tentang bagaimana menganalisis dan mengkritisi media yang tidak memiliki peran positif dalam peliputan konflik.

Menengok sejenak terhadap keberadaan jurnalisme damai sebenarnya telah melewati sejarah yang cukup panjang. Kemunculan jurnalisme damai ialah saat dimulainya Operasi Badai Gurun pada Perang Teluk 1997. Kala itu Amerika bersama sekutunya menyerang Irak yang dipimpin oleh Saddam Husein. Proses penyiaran saat itu dilakukan oleh jaringan televisi CNN yang melakukan peliputan eksklusif dan siaran langsung detik demi detik peristiwa yang memporakporandakan bangunan-bangunan dan merenggut ribuan nyawa di Irak. Semua ini disajikan dalam siaran yang terbuka dan vulgar. Namun akhirnya di Amerika sendiri terjadi protes keras atas tindakan tersebut karena peliputan tersebut tidak sesuai dengan nilai jurnalisme dari sisi kemanusiaan. Protes ini dilakukan oleh akademisi, politisi, jurnalis, dan masyarakat.

Barulah kemudian jurnalisme damai ini kembali digagas oleh Johan Galtung bersama para penggiat dan pakar perdamaian lainnya pada tahun 1997 di Taplow Court, Inggris. Dasar pemikiran jurnalisme damai adalah media cenderung memainkan peran negatif

dalam meningkatkan ketegangan antar aktor konflik, padahal sebenarnya media bisa memainkan peran positif dalam upaya mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Johan Galtung menyampaikan dalam jurnalisme damai, pemberitaan yang mengharuskan media menjadi resolusi konflik. Jurnalisme damai memiliki empat orientasi yaitu perdamaian, kebenaran, masyarakat, dan penyelesaian.

## Hasil dan Pembahasan

### Narasi Pemberitaan Harian Kompas

Berdasarkan analisa narasi, narasi yang disampaikan oleh Harian Kompas sebagai berikut:

Pemilihan Umum tahun 2019 di Indonesia telah dilaksanakan, perhitungan pun telah diumumkan. Akan tetapi muncul sengketa di dalamnya. Dugaan kecurangan, kesalahan perhitungan, hingga tuduhan penyelenggara Pemilu tidak kompeten turut muncul mewarnai sengketa ini. Aksi protes yang dibalut dengan istilah aksi massa kemudian menjadi jalan mencari keadilan bagi sebagian orang. Bagi sebagian lainnya hanya sekadar untuk menumpahkan kekesalan, bahkan ada pula yang sengaja 'memanfaatkan' situasi disrupsi. Sekelumit kisah ini nyatanya juga terjadi di Pemilu 2019 yang diwarnai aksi massa tanggal 21-22 Mei 2019. Agenda utama aksi massa ini adalah penolakan hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden 2019.

Pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 baik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden bisa diselesaikan sehari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Tanggal 21 Mei 2019, hasil rekapitulasi bisa disampaikan ke publik. Selesai rekapitulasi di KPU, saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi menyatakan bahwa

menolak hasil Pilpres 2019 dengan tidak menandatangani berita acara. Pun dengan Prabowo-Sandi yang menyatakan menolak karena beranggapan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan bahwa masih ada waktu 3 kali 24 jam untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, jika tidak ada pengajuan sengketa maka akan langsung dilaksanakan penetapan Capres-Cawapres berdasarkan hasil rekapitulasi Pilpres 2019.

Pihak BPN tidak tinggal diam, di hari Senin (21/5/2019) mendatangi MK untuk mengajukan laporan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi, dua laporan tersebut ditolak. Bawaslu menyatakan salah satu dasar penetapan itu ialah belum terpenuhinya kriteria serta kualitas bukti-bukti yang diajukan karena hanya memasukkan hasil cetakan pemberitaan media daring dan tautan media daring. Di hari itu pula, mulai muncul aksi massa di depan Kantor KPU dan Bawaslu. Sehari sebelumnya, Polda Metrojaya memang sudah mendapati beberapa pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang akan melakukan demonstrasi. Itulah mengapa, aparat keamanan menyiagakan diri agar tidak terjadi *chaos*. Aparat keamanan yang berada di provinsi selain DKI Jakarta juga melakukan pengamanan untuk mencegah masyarakatnya berangkat ke Jakarta dan mengikuti demonstrasi.

Aksi massa yang awalnya kondusif kemudian berubah menjadi menegangkan. Polisi yang mengamankan unjuk rasa yang terkonsentrasi di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Polisi juga terus bertindak persuasif. Situasi di Jalan MH Thamrin hingga pukul 22.00 masih mencekam. Pengunjuk rasa sempat bentrok dengan

polisi. Pucak bentrokan terjadi saat massa menyerang brikade polisi dan melemparkan petasan. Hampir sampai pukul 22.55, polisi terus berupaya menghentikan kerusuhan ini. Sementara itu, di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat, yang sempat menjadi konsentrasi massa pengunjung rasa, aparat dari TNI AD bersama tokoh masyarakat setempat mengamankan wilayah dari kerusuhan. Sebelumnya, Asrama Brimob di Petamburan diserang para perusuh. Perusuh membakar puluhan mobil yang diparkir di dekat asrama.

Dugaan adanya penyusupan perusuh ini diperkuat dengan ditemukannya uang di dalam amplop bertuliskan nama-nama orang yang di dalamnya terdapat yang Rp. 200.000 sampai Rp 500.000. Polisi juga menemukan uang Rp. 5 juta dan uang 2.470 dollar AS yang disebut sebagai uang operasional. Penemuan ini di daerah Petamburan, Jakarta Barat. Polda Metro Jaya hingga Rabu malam telah menangkap 257 orang yang diduga menjadi provokator bentrokan massa dengan aparat keamanan. Mereka ditangkap di tiga lokasi, yaitu depan Gedung Bawaslu (72 orang), Petamburan (156 orang), dan Gambir (29 orang).

Sementara itu, para elite politik tengah berupaya membangun kekuatan. Banyak pihak yang menginginkan adanya upaya rekonsiliasi antar calon presiden agar dapat meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat. Beberapa kali Paslon Prabowo-Sandi memberikan statement kemenangan sekaligus meminta kepada pendukungnya agar tidak bersikap anarkis selama melakukan demonstrasi. Pun dengan Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin yang memberikan pidato kemenangan dan meminta kepada pihak untuk menjaga persatuan Indonesia. Jokowi-Ma'ruf Amin menginginkan

segera menggelar pertemuan dengan Prabowo-Sandi Uno dan para pendukung yang tergabung dalam BPN. Niat ini disambut baik oleh para elite politik yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla dengan membuat lobi-lobi politik agar pertemuan ini segera terealisasi.

Dari kerusuhan ini didapatkan data bahwa terdapat 6 orang meninggal dan ratusan korban terluka. Jakarta menjadi kota yang mencekam sehingga perkantoran terpaksa diliburkan untuk mencegah terjadinya situasi yang lebih parah. Pun dengan Pasar Tanah Abang yang ditutup selama 2 hari. Area tersebut termasuk dalam titik merah kerusuhan. Berita kerusuhan terlihat semakin mencekam saat masing-masing akun media sosial membuat cuitan atau unggahan tentang kerusuhan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan beserta kementerian lain membuat kebijakan pembatasan akses media sosial selama tanggal 22-23 Mei 2019. Kerusuhan ini juga mendapat perhatian dari media asing dengan berbagai perspektifnya. Kerusuhan pasca Pemilu dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam proses negara demokrasi. Akan tetapi sisi kemanusiaan sebaiknya tetap menjadi prioritas utama di sebuah negara. Begitupun dengan pembatasan akses media sosial, jika terlalu lama dilakukan maka akan mengancam demokratisasi di Indonesia.

Aksi massa pun menurun, terhitung mulai tanggal 24-25 Mei 2019 kerusuhan tidak lagi terjadi. Sejumlah caleg mulai mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, termasuk pula paslon Prabowo-Sandi yang menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan masalah penolakan hasil Pilpres 2019. Pasar Tanah Abang dan kantor-kantor di Jakarta mulai beroperasi kembali. Meskipun demikian, kerugian material

akibat kerusuhan ditaksir bisa mencapai 2 triliun.

### **Konstruksi “Pertentangan” Berdasarkan Teks**

Untuk mengetahui bagaimana kerusuhan ditampilkan di dalam teks berita, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yakni karakter, tokoh, oposisi biner, dan penggunaan kata dalam teks. Pertama yang akan dibahas ialah karakter dan tokoh. Peristiwa faktual yang terkonstruksi dalam teks berita juga tidak terlepas dari karakter dan tokoh tertentu. Hal ini ditujukan untuk membuat pembaca bisa memiliki gambaran atas suatu peristiwa layaknya sebuah cerita. Dari 21 berita yang telah dianalisa peneliti, terdapat beberapa karakter yang dimiliki oleh tokoh yang muncul di berita.

*Pertama*, karakter penjahat ini dimiliki oleh perusuh yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingan tertentu. Perusuh ini bisa identifikasi saat para peserta aksi massa sudah diminta mundur karena melebihi jam demonstrasi namun justru tidak menghiraukan himbuan petugas kepolisian dan justru melemparkan petasan dan bom molotov kepada petugas.

*Kedua*, karakter donor atau tokoh yang bertindak memberikan bantuan kepada pahlawan dengan kekuatan supranatural, legitimasi, atau kekuatan lain yang dimilikinya. Tokoh yang bertindak sebagai donor dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 ialah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, para elit politik yang mengupayakan rekonsiliasi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Para elit politik ini meliputi: Try Sutrisno, Said Aqil Siroj, Abdul Mu'ti, Anies Baswedan, Din Syamsuddin, Letjen (Purn) Agus Widjojo, dan Mahfud MD. Peran wakil Presiden RI dalam teks dijelaskan bahwa Jusuf Kalla tengah mengupayakan lobi-lobi politik

dengan sejumlah elit politik agar pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subiyanto segera terealisasi. Sementara Kemenkopolhukam beserta jajaran Menteri lainnya membuat kebijakan pembatasan akses media sosial untuk mencegah menyebarnya hoaks di kalangan masyarakat.

*Ketiga*, karakter penolong dimiliki oleh sukarelawan Palang Merah Indonesia dan petugas kesehatan Polda Metrojaya yang bersedia memberikan bantuan kemanusiaan selama kerusuhan berlangsung. Karakter penolong ini selain menolong pahlawan juga menolong tokoh lain yang membutuhkan.

*Keempat*, karakter pengirim yang berarti memberikan mandat kepada pahlawan untuk menjalankan misi tertentu. Karakter pengirim ini dimiliki oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang memberikan mandat kepada aparat keamanan untuk menjaga situasi pasca pengumuman hasil Pemilu 2019 serta menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan Indonesia. Tokoh ini juga menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menyelesaikan persoalan sengketa pemilu. Karakter pengirim juga dimiliki oleh Prabowo yang menginstruksikan kepada pendukungnya agar dapat melakukan aksi massa dengan damai.

*Kelima*, karakter putri dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dua lembaga ini dalam peristiwa kerusuhan ini adalah pihak yang menjadi sasaran demonstrasi. *Keenam*, pahlawan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 dimiliki oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri yang menjalankan misi untuk menjaga keamanan selama aksi massa penolakan hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden tahun 2019 ini. Tokoh pahlawan ini juga ditampilkan dalam fotografi jurnalistik bagaimana aparat

keamanan yang sedang melakukan tugasnya dengan *angle* yang unik seperti masyarakat yang memberikan makanan bagi Polri, Polri sedang kelelahan, dan bagaimana hubungan antara Polri dan peserta aksi massa. Selain aparat kemananan, karakter pahlawan juga dimiliki oleh tokoh yang diminta untuk menyelesaikan segala persoalan sengketa Pemilu 2019 sesuai dengan tugas dan wewenangnya ialah Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi ini adalah intitusi final yang akan memberikan keputusan apakah aduan diterima, diproses, dan membuahakan kebijakan baru terkait hasil Pilpres 2019.

Berdasarkan analisa karakter dan tokoh dalam teks berita sebenarnya telah menunjukkan adanya pertentangan yang terjadi antara tokoh pahlawan dan penjahat. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian ialah apakah benar jika akar permasalahan dari kerusuhan 21-22 Mei 2019 ini murni karena tokoh pahlawan yang harus menjalankan misinya untuk menumpas tokoh penjahat. Nyatanya tidak sesederhana itu mendefinisikan pertentangan apalagi berhubungan dengan konflik politik. Bisa saja yang terlihat sedang beradu di medan kerusuhan tersebut hanyalah tokoh real saat bentrok pecah, lalu aktor penyebab akar masalah masih bersembunyi dan belum diketahui. Itulah mengapa diperlukan analisa yang lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana Harian *Kompas* ini menampilkan pertentangan yang terjadi selama kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Antara penjahat dan pahlawan ini bisa dilihat oposisi berlawanannya (oposisi biner). Oposisi biner secara sederhana digambarkan sebagai oposisi antara “perusak” dan “penjaga”. Perusuh yang masuk dalam aksi massa penolakan hasil Pilpres 2019 tergambar sebagai

kelompok yang melakukan tindakan penyerangan kepada petugas keamanan ketika sudah melewati batas waktu aksi massa. Perusuh ini tidak mengindahkan himbauan dari aparat keamanan dan justru menyerang dengan melakukan pelemparan petasan dan bom molotov kepada petugas. Perusuh ini melakukan tindakan ofensif atas dasar nilai yang terinternalisasi dalam dirinya, bisa karena fanatisme dukungan terhadap salah satu capres hingga dugaan adanya paham radikal.

Perusuh diduga berafiliasi dengan kaum radikal sehingga memiliki oposisi biner dengan aparat keamanan yang cenderung memiliki sifat patriotism dan nasionalisme. Sementara aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri memiliki posisi defensif aktif yang dapat melakukan tindakan ofensif manakala pihak perusuh sudah melewati batas yang telah ditentukan. Aparat keamanan pun menembakkan gas air mata. Jika tindakan perusuh dianggap salah, maka tindakan aparat keamanan ini justru ‘bisa’ dibenarkan dengan alasan penjagaan situasi agar kembali kondusif.

Pertentangan antara perusuh dan aparat keamanan pada saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah sekelumit dari kisah panjang rentetan konflik Pemilu 2019. Dari oposisi biner ini mampu menggambarkan bahwa ada dua pihak yang sedang bertikai di lapangan. Akan tetapi, jika merujuk pada penggunaan kata yang terdapat dalam teks sebenarnya pertentangan ini adalah buah panjang dari polarisasi dukungan terhadap calon presiden. Awalnya konflik masih bersifat ketegangan, namun pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu ini seakan menjadi puncak dari ketegangan yang selama ini terjadi. Menyikapi hal ini, Harian *Kompas* sebenarnya memilih untuk menampilkan pertentangan tidak secara eksplisit dalam satu berita penuh. Akan

tetapi, *Harian Kompas* memilih menggunakan cara menampilkan peristiwa yang mengarah pada perdamaian barulah di dalamnya memuat adanya pertentangan. Hal ini nampak dari pemilihan kata di *Harian Kompas* yang meminimalisir simbol-simbol pertentangan.

*Pertama*, pemilihan kata pada judul cenderung menggunakan istilah damai. Kosa kata yang muncul meliputi: jaga persatuan, bersatu, keamanan, pertolongan, rumah bersama, damai, dan demokrasi. Judul yang menunjukkan adanya pertentangan hanya terlihat pada dua judul berita. *Pertama* judul berita tanggal 23 Mei 2019 halaman 1 “*Demonstrasi Hasil Pemilu: TNI/Polri Amankan Situasi Jakarta*” dan yang kedua adalah berita dengan judul “*Demo Hasil Pemilu: Kelompok Radikal Diduga Susupi Perusuh*” tanggal 24 Mei 2019. Dua judul ini menunjukkan jika sedang terjadi pertentangan dalam demonstrasi hasil Pemilu 2019.

*Kedua*, pemilihan kata yang dilakukan oleh *Harian Kompas* pada isi berita selama tanggal 21-25 Mei 2019 cenderung tidak sehari-hari dalam pemilihan judul. Perbedaan ini bisa dipahami dari kaca mata ruang redaksi bahwa judul memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kesan pertama pembaca. Salah memilih judul akan berimbas pada pembentukan opini publik dan merebaknya konflik yang lebih besar. Kosa kata kerusuhan, aksi saling dorong, provokator, penembakan, dan lawan politik bisa ditemukan dalam teks berita. Namun lagi-lagi *Harian Kompas* hanya menampilkan sedikit dari keseluruhan berita, itupun terdapat pada bagian tengah atau justru akhir berita.

Dari pemilihan kata ini, bisa dilihat bahwa *Harian Kompas* menampilkan pertentangan antara perusuh dan aparat keamanan tidak secara eksplisit

disampaikan. Bahkan *Harian Kompas* sangat berhati-hati dalam memilih judul berita. *Harian Kompas* memilih menampilkan hal-hal lain yang berkaitan dengan damai dibandingkan menyampaikan pertentangan yang terjadi di medan kerusuhan. Pertentangan antara kontestan Pilpres 2019 terlihat dengan pemilihan kata “lawan politik” yang menunjukkan bahwa memang ada pertentangan politik sebagai sesama peserta pilpres.

### **Jurnalisme Damai “Menjaga Persatuan” Ala *Kompas***

Bagaimana *Harian Kompas* melaksanakan jurnalisme perdamaian perlu ditengok dari narasi yang nampak dari teks berita. *Pertama*, cara *Kompas* menceritakan suatu peristiwa. Kerusuhan adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Namun sebuah media massa akan memiliki caranya sendiri dalam membahasakan peristiwa yang terjadi ke dalam teks berita. Merujuk pada Eriyanto cara menceritakan peristiwa tersebut ada di acara yakni melihat story dan alur. Eriyanto menjelaskan bahwa alur atau plot adalah yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Sedangkan cerita adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa dimana peristiwa tersebut bisa ditampilkan dalam teks maupun hanya tersirat dalam teks.

Aksi massa penolakan hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden 2019 digambarkan sebagai sikap yang wajar bagi negara demokrasi. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin melalui konstitusi Indonesia. Akan tetapi beberapa pihak menginginkan agar aksi massa berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Setelah kerusuhan pecah, *Harian Kompas* ternyata tidak sevara gambling menceritakan kronologi kerusuhan dalam sebuah berita *headline*

yang besar. Justru cerita tentang kerusuhan muncul di tengah-tengah berita. Ada pula yang tergambar dari tulisan *feature* yang dibuat oleh Harian Kompas untuk menggambarkan dampak dari kerusuhan.

Tiga berita yang ditulis dengan model *feature* tersebut terdapat pada berita “Kemanusiaan: Mereka yang Gigih Memberikan Pertolongan”, “Unjuk Rasa: Tatapan Sendu dari Tanah Abang” dan “Senangnya Tanah Abang Kembali Macet”. Jika merujuk pada pengertiannya, *feature* adalah tulisan hasil reportase mengenai suatu peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Dari 3 berita tersebut memang nampak upaya Kompas untuk menggugah empati pembaca bahwa dalam peristiwa kerusuhan ada beberapa hal yang kadang luput dari perhatian seperti aksi kemanusiaan dan dampak dari aksi massa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Dari berita *feature* ini, bagaimana kronologi kejadian bisa terlihat termasuk pula tingkat kengeriang suasananya.

Dapat dikatakan bahwa dari aspek cerita dan alur, Kompas berupaya menceritakan rentetan kejadian pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu dengan berbagai pendekatan. Kebanyakan cara Kompas bercerita adalah dengan menceritakan hal yang masuk dalam upaya penyelesaian dan mengambil *angle* persatuan dalam bingkai demokrasi termasuk pula menarik empati pembaca dengan menghadirkan beberapa kisah kemanusiaan yang luput dari perhatian pers Indonesia.

Cara Harian Kompas bercerita ini disesuaikan dengan pemahaman wartawan bahwa dalam peristiwa kerusuhan sekalipun seringkali ada hal-hal kecil berdampak yang tidak dikabarkan.

Misalnya, akibat kerusuhan ada pihak-pihak lain yang menjadi kehilangan pekerjaan, bangkrut, kerugian material, hingga kehilangan nyawa. Hal ini untuk menyadarkan pihak yang bertikai agar dapat menghentikan kerusuhan. Hal ini sebenarnya senada dengan pemikir Johan Galtung yang mendefinisikan bahwa konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang dalam mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Penghalang ini ialah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Hal ini pula yang terjadi pada kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Cara menceritakan yang seperti ini sebenarnya sangat baik karena mengandung dua hal yang akan menggiring pembaca mampu menangkap isi dari berita. Sehingga dalam berita tidak serta merta hanya menceritakan suatu kejadian, namun juga menunjukkan kronologi kejadian yang membuat pembaca turut membayangkan dengan latar waktu dan tempat yang tergambar dalam cerita. Untuk menjelaskan tentang kerusuhan, Kompas juga membuat infografis kronologi kejadian yang terdapat pada halaman 1 Harian Kompas edisi 23 Mei 2019.

Memang benar jika berita yang baik adalah berita yang memiliki nilai berita. Kerusuhan 21-22 Mei 2019 menunjukkan adanya gangguan keamanan yang berarti tengah ada pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Berkaitan dengan nilai berita, Johan Galtung dan Marie Holmboe Ruge memberikan kriteria tersendiri yaitu frekuensi, *bad news is good news*, tak terduga, personalisasi peristiwa, kepenuhartian, kedekatan budaya atau *cultural proximity*, berkaitan dengan pemimpin negara, individu, konflik, prediksi, penting, besar, aktual, kedekatan, tenar, dan *human interest*. Konflik masuk pada salah satu nilai berita, maka tidak heran jika kerusuhan 21-22 Mei

2019 kemarin mendapat perhatian dari media massa di Indonesia, baik media massa nasional maupun media massa lokal.

Ada beberapa hal yang menjadi unsur kelayakan suatu berita yakni berita harus akurat, berita harus lengkap, adil, dan berimbang, obyektivitas berita harus diutamakan, ringkas dan jelas, serta berita harus hangat. Johan Galtung sebenarnya telah menyebutkan adagium *bad news is good news* dalam menggambarkan nilai berita yang selama ini dipegang oleh jurnalis. Akan tetapi, hal tersebut sudah tidak relevan lagi jika melaksanakan jurnalisme perdamaian dalam peliputan konflik. Tidak menjadi masalah jika setiap jurnalis mengangkat pemberitaan tentang konflik, namun yang perlu diperhatikan ialah bagaimana peristiwa tersebut bisa ditampilkan dan tidak menyebabkan konflik menjadi lebih besar.

Pada poin ini, *Harian Kompas* memilih memberikan perhatian pada bagaimana ‘pemerintah’ berupaya menjaga persatuan Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa *headline* *Harian Kompas* yang menunjukkan perhatiannya pada upaya ‘pemerintah’ mengajak masyarakat menjaga persatuan Indonesia. *Headline* tanggal 22 Mei 2019 berjudul “*Jokowi: Mari Kita Bersatu*”, *headline* tanggal 23 Mei 2019 berjudul “*Indonesia Rumah Bersama*”, dan *headline* tanggal 24 Mei 2019 berjudul “*Jaga Suasana Damai*”.

Beberapa berita *Harian Kompas* memberikan penekanan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan perdamaian. Seperti pada berita-berita tanggal 22 Mei 2019 yang berjudul *Demonstrasi Hasil Pemilu: TNI/Polri Amankan Situasi di Jakarta*”, “*Cegah Hoaks, Media Sosial Dibatasi*”, dan “*Demo Hasil Pemilu: Aksi di Sejumlah Daerah Berlangsung Aman*”. Dari berita ini

terlihat bagaimana kondisi keamanan nasional dijaga oleh pihak aparat keamanan yang berjaga selama demonstrasi berlangsung. Pun dengan elit politik yang mengupayakan rekonsiliasi dengan melakukan lobi-lobi politik. Meskipun upaya rekonsiliasi antara dua Calon Presiden ini belum membuahkan hasil.

Pada struktur narasi teks, *Harian Kompas* memilih untuk menampilkan upaya resolusi konflik terlebih dahulu daripada menceritakan kronologi kerusuhan. Struktur seperti ini dipilih untuk dua tujuan sekaligus. *Pertama*, *Harian Kompas* ingin menyampaikan bahwa medianya memiliki sudut pandang lain dalam menampilkan berita yang bernuansa pertentangan. Tidak terpungkiri bahwa isu konflik menjadi jualan yang menarik kepada khalayak, akan tetapi terkadang hal tersebut tidak membuat konflik semakin mengecil. Maka harapan-harapan untuk kembali berdamai disampaikan di awal penulisan berita. *Kedua*, *Harian Kompas* sebagai pemimpin opini publik ingin membuat publik tidak terprovokasi dari berita yang disajikan. Penekanan yang kedua ini kemudian diwujudkan dengan menyampaikan kronologi konflik justru di tengah berita. Judul-judul yang bombastis sangat mudah membakar masyarakat. Hal ini yang sangat dihindari *Harian Kompas*. Nilai persatuan dan demokrasi sebagai nilai yang dijunjung dalam pemberitaan. Analisa ini telah terkonfirmasi oleh Sutta Darmaputra, Wapemred *Harian Kompas* yang ditemui peneliti pada tanggal 25 November 2019.

Nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh *Harian Kompas* nampak pada narasi yang muncul pada pemberitaan kerusuhan. Nyatanya, *Kompas* memilih untuk tetap memberikan porsi yang lebih pada pemberitaan hasil Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan

Presiden di beritanya. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan pihak Harian *Kompas* bahwa *Kompas* ingin tetap mengawal demokrasi di Indonesia. Pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu merupakan rentetan dari proses pesta demokrasi, pun dengan adanya demonstrasi penolakan hasil pemilu. Kedua hal ini adalah dua hal yang masuk dalam proses Pemilu sehingga tidak bisa dikaburkan faktanya. Akan tetapi, *standing position* Harian *Kompas* memilih cara aman dengan membela persatuan Indonesia sebagai amanah dari berdirinya negara Indonesia.

Harian *Kompas* mengulang pernyataan Presiden Indonesia dalam judul beritanya. Jika telisik lebih dalam, di Indonesia yang menganut sistem presidensial ini berarti sistem negaranya dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dimana presiden Indonesia menjabat dua posisi sekaligus yakni sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara konsep negara adalah konsep yang abstrak. Banyak pendapat yang memberikan definisi masing-masing untuk membedah apa sebenarnya negara ini. Konsep imajiner negara ini memang tidak terlepas dengan relasi kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dengan sederet aturan yang menjadi dasarnya. Jika ditengok lebih dalam lagi, benar Indonesia berdiri atas dasar sebuah nilai yang dinamakan Pancasila, dimana Pancasila ini pula yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini juga terinternalisasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memuat tentang tujuan negara salah satunya menjaga persatuan Indonesia.

Pemilihan Umum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi yang melibatkan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia

yang memenuhi persyaratan. Kisah panjang Pemilu 2019 nyatanya menorehkan beberapa catatan yang ‘mengancam persatuan Indonesia’. Sebut saja polarisasi antar pendukung calon presiden yang sangat kentara pertentangannya baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Politik identitas terbukti ampuh di Pilkada DKI tahun 2017. Maka tidak mengherankan jika pada Pilpres 2019 politik identitas seakan menjadi kudapan lezat masing-masing tim pemenang calon untuk menggalang dukungan. Akibatnya, polarisasi pendukung yang sudah terbentuk sebelumnya, semakin mengeras kemudian berimbas pada fanatisme yang radikal dan tidak peduli dengan kebenaran yang ada. Polarisasi ini menyebabkan anggapan bahwa pola pikir mereka tentang politik adalah sebuah kebenaran sementara pemikiran rival adalah salah.

Hari pelaksanaan Pemilu 2019 nyatanya bukan sebuah titik dimana berhentinya polarisasi pendukung. Masing-masing pendukung memiliki pemahaman sendiri tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah berdasarkan hasil *Quick Count* dari masing-masing tim dan lembaga survey. Sikap saling klaim kemenangan antar pendukung terus terjadi. Saling serang di media sosial berimbas pada sikap permusuhan di kehidupan nyata. Pada pelaksanaan pemilu sendiri menorehkan sejarah meninggalnya sejumlah petugas KPPS yang membuat berbagai tuduhan kepada penyelenggara pemilu.

Polarisasi yang semakin keras ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya persatuan Indonesia. Puncaknya adalah kerusuhan pada aksi massa penolakan hasil pemilihan Pemilihan Presiden 2019. Meski kerusuhan ini bukan saling serang antar kelompok pendukung, namun distorsi di

masyarakat tentunya akan berimbas pada kondusivitas negara. Pilihan yang memungkinkan untuk diambil pada kondisi seperti ini ialah bagaimana menjaga agar Indonesia agar tetap utuh sebagai sebuah entitas negara yang menyatukan berbagai kelompok manusia yang mendiami satu wilayah yang sama. Perspektif ‘damai’ yang bisa dihadirkan di sini ialah saat masyarakat saling bersatu dalam bingkai NKRI.

### **Pemenuhan Elemen Jurnalisme Perdamaian**

Jakob Oetama sebagai pendiri *Kompas* memberikan pesan bahwa peranan pokok media untuk mencari dan menghadirkan makna dari peristiwa atau masalah. Media bukan sekadar menghadirkan fakta, melainkan juga latar belakang riwayat dan prosesnya, hubungan kausal maupun hubungan interaktif. Pesan ini terpapang besar di dinding tepat sebelah kiri pintu masuk ke ruang redaksi. Jika ditelaah, sebenarnya pesan ini mengandung unsur-unsur jurnalisme perdamaian yang telah peneliti tulis di bab II. Namun apakah pesan ini telah dilaksanakan oleh *Harian Kompas* dalam memberitakan kerusuhan 21-22 Mei 2019 dengan pendekatan jurnalisme damai?

- a. Menghindari penggunaan bahasa yang kasar sebagai bagian dari upaya humanisasi berita

Agak sulit sebenarnya untuk menemukan parameter penggunaan bahasa yang kasar ini seperti apa dan sejauh mana. Akan tetapi untuk menyederhanakannya peneliti memilih mencari penggunaan bahasa yang cenderung memilih kosa kata damai atau konflik. Berdasarkan analisa narasi yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa *Harian Kompas* memilih untuk menggunakan kata-kata yang tidak

menunjukkan adanya “konflik” pada pemberitaannya. Penggunaan bahasa ini sangat penting untuk dilihat karena akan berpengaruh pada makna yang muncul dari teks berita yang dibuat. *Harian Kompas* memperlihatkan bahwa konflik masih bersifat ketegangan, namun pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu ini seakan menjadi puncak dari ketegangan yang selama ini terjadi. Menyikapi hal ini, *Harian Kompas* sebenarnya memilih untuk menampilkan pertentangan tidak secara eksplisit dalam satu berita penuh. Akan tetapi, *Harian Kompas* memilih menggunakan cara menampilkan peristiwa yang mengarah pada perdamaian barulah di dalamnya memuat adanya pertentangan. Hal ini nampak dari pemilihan kata di *Harian Kompas* yang meminimalisir simbol-simbol pertentangan.

Dari pemilihan kata ini, bisa dilihat bahwa *Harian Kompas* menampilkan pertentangan antara perusuh dan aparat keamanan tidak secara eksplisit disampaikan. Kata perusuh ini muncul karena merujuk pada ungkapan aparat kepolisian yang menyebut bahwa aksi massa penolakan hasil rekapitulasi pemilihan presiden disusupi oleh perusuh. Perusuh ialah kelompok yang melakukan tindakan penyerangan kepada petugas keamanan ketika sudah melewati batas waktu aksi massa. Perusuh ini tidak mengindahkan himbuan dari aparat keamanan dan justru menyerang dengan melakukan pelemparan petasan dan bom molotov kepada petugas. Perusuh ini melakukan tindakan ofensif atas dasar nilai yang terinternalisasi dalam dirinya, bisa karena fanatisme dukungan terhadap salah satu capres hingga dugaan adanya paham radikal.

Bahkan *Harian Kompas* sangat berhati-hati dalam memilih judul berita. *Harian Kompas* memilih menampilkan hal-

hal lain yang berkaitan dengan damai dibandingkan menyampaikan pertentangan yang terjadi di medan kerusuhan.

- b. Menggunakan pendekatan yang tidak berpihak pada kelompok manapun dan menghindari unsur pertentangan

Ada dua pihak yang digambarkan tengah terlibat pertentangan pada Pemilihan Presiden 2019 yakni, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan hasil analisa narasi justru yang muncul menjadi sebuah pertentangan pada saat meledaknya kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 adalah antara perusuh dengan aparat keamanan, dalam hal ini TNI/Polri. Perusuh ini memang digambarkan sebagai suatu pihak yang membuat keadaan menjadi tidak kondusif karena berusaha menyerang petugas keamanan dengan melembarkan petasan dan bom molotov. Padahal jika dilihat, aparat keamanan turut menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa perusuh yang enggan membubarkan diri. Menampilkan unsur pertentangan ini sebenarnya sedapat mungkin harus dihindari karena dapat menimbulkan kekecewaan dari pihak yang digambarkan dalam berita.

Merujuk pada undang-undang no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, peserta aksi massa memberikan pemberitahuan 3x24 jam sebelum aksi di gelar kepada aparat keamanan.<sup>24</sup> Surat pemberitahuan ini berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan durasi, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta.

Setiap 100 orang peserta harus ada 1-5 orang penanggungjawab. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, Undang-Undang no 9 tahun 1998 memberikan batasan bahwa demonstrasi dilakukan pada pukul 06.00-18.00 di lokasi terbuka dan 06.00-22.00 di lokasi tertutup.

Bila merujuk pada aturan ini, jelas bahwa keberadaan peserta aksi massa di lokasi demonstrasi hingga pukul 20.00 merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Apalagi yang terjadi justru keberanian peserta untuk menyerang aparat keamanan dan melakukan tindakan kerusuhan. Kata perusuh pun menjadi perwakilan kata untuk menyebutkan subyek atau orang yang melakukan kerusuhan berdasarkan data di atas. Kemudian, satu hal yang diperhatikan di sini ialah adanya kata perusuh menunjukkan bahwa narasi tengah bekerja. Kekuatan bahasa membuat terjadinya pengelompokan dan kategorisasi terhadap suatu tindakan yang tentunya hal ini akan mempermudah bagi aparat keamanan untuk melegitimasi tindakannya. Bila ada kosa kata perusuh, berarti lawannya adalah bukan perusuh. Bukan perusuh ini merujuk pada aksi massa yang sesuai ketentuan dan menjaga kondusivitas di lapangan.

Tidak memihak pada kelompok manapun berarti media massa mencoba memosisikan diri di titik yang netral. Sementara media sendiri terlahir dari proses kapitalisme yang memiliki maksud mulia untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Sehingga media massa adalah bisnis kredibilitas dan kepercayaan, semakin media itu kredibel maka kepercayaan masyarakat juga akan tinggi. Untuk mendapatkan posisi yang netral memang cukup sulit karena tetap ada kepentingan yang harus dibela. M. Hernowo pun mengungkapkan jika

---

<sup>24</sup> Undang-Undang no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

independensi Kompas sebagai media massa jauh lebih dijaga.

Menengok kembali ke sejarah berdirinya Kompas yang memang diminta oleh pemerintah saat itu untuk ‘menandingi’ pers komunis. Maka tidak mengherankan jika kepentingan yang dibela adalah kepentingan nasional dalam hal ini persatuan Indonesia. Dari beberapa berita yang dirilis Harian Kompas perspektif yang banyak diperlihatkan adalah hal-hal yang mengarah kepada persatuan Indonesia. Jacob Utama seringkali memberikan peringatan kepada wartawan bahwa berita itu bisa boom setiap saat namun jika negara ini terkoyak maka yang rugi adalah kita semua. Sehingga wartawan harus sangat hati-hati dalam menampilkan foto dan berita konflik karena jika salah membuat angle berarti media massa tengah mempercepat runtuhnya bangsa ini.

Sementara konsep negara adalah konsep yang abstrak. Banyak pendapat yang memberikan definisi masing-masing untuk membedah apa sebenarnya negara ini. Konsep imajiner negara ini memang tidak terlepas dengan relasi kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dengan sederet aturan yang menjadi dasarnya. Jika ditengok lebih dalam lagi, benar Indonesia berdiri atas dasar sebuah nilai yang dinamakan Pancasila, dimana Pancasila ini pula yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini juga terinternalisasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memuat tentang tujuan negara salah satunya menjaga persatuan Indonesia.

Lalu apakah pada jurnalisme perdamaian konsep tidak memihak pada kelompok yang bertikai berarti harus memilih pihak lain untuk dibela? Kondisi keberagaman di Indonesia mau tidak mau harus menjadi perhatian dalam

pelaksanaan jurnalisme damai di Indonesia. Media massa harus bisa memahami bahwa kemampuan masyarakat untuk mencerna informasi sangat berbeda-beda masing-masing orang termasuk pula efek yang ditimbulkan pun akan berbeda-beda. Hal utama yang perlu dihindari ialah ‘menyuburkan’ konflik yang telah terjadi. Mungkin untuk saat ini, kepentingan yang perlu dibela adalah persatuan Indonesia, namun tidak serta merta menampilkan bahwa versi ‘pemerintah’ adalah versi yang benar dan versi pemberontak adalah versi yang salah. Lagi-lagi, yang perlu dibela dalam jurnalisme perdamaian adalah sisi humanisme bahwa setiap manusia berhak untuk merasakan perdamaian.

c. Jurnalis melihat pihak-pihak yang berkonflik sebagai manusia

Louis Leahy (1985) menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya ialah makhluk yang memiliki karakteristik khas dan memiliki martabat khusus. Dalam kehidupan yang riil, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, mulai dari tampilan fisik, strata sosial, kebiasaan hingga tingkat pendidikannya. Sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sudah selayaknya manusia diperlakukan secara baik oleh manusia lainnya. Manusia merupakan subyek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Sehingga, jurnalis sebagai manusia pun harus memahami konsep ini untuk melihat bahwa orang-orang yang terlibat dalam konflik adalah manusia yang memiliki martabat.

Dalam kondisi konflik seringkali korban konflik diperlihatkan secara terang-terangan dengan cerita kronologis yang mengerikan atau gambar korban yang berlumuran darah. Mungkin maksud jurnalis adalah untuk

memperlihatkan fakta yang sesungguhnya. Akan tetapi, menampilkan korban yang mengesankan dengan maksud mengambil empati masyarakat justru menunjukkan sikap tidak menghormati korban tersebut sebagai manusia yang bermartabat dan sebaiknya tidak ditampilkan dalam pemberitaan. Di titik ini, *Harian Kompas* menunjukkan perhatiannya kepada pihak yang berkonflik sebagai manusia. Tidak ditemui penggambaran situasi yang menunjukkan adanya pembantaian tidak beradab dan penerbitan gambar yang menunjukkan adanya kejadian yang berdarah.

Manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu gambar di *headline* *Harian Kompas* tanggal 24 Mei 2019 menunjukkan bahwa ada seorang warga yang memberikan makanan kepada aparat keamanan untuk berbuka puasa. Di titik ini, ada kesadaran dari *Harian Kompas* bahwa dalam konflik, tidak serta merta selalu diliputi dengan kengerian atau peristiwa gontok-gontokan namun ada sisi kemanusiaan yang lahir murni dari manusia kepada manusia lainnya.

Mereka yang bertugas menjaga keamanan tidak selamanya memiliki kekuatan penuh layaknya superhero, pun dengan peserta kerusuhan yang memiliki kekuatan baja untuk melawan aparat keamanan. Ada sisi-sisi dimana kedua pihak 'adalah' manusia biasa yang bisa saja terluka dan membutuhkan uluran tangan manusia lainnya, dalam hal ini adalah petugas kesehatan dari Palang Merah Indonesia. Tidak perlu dengan menampilkan 'darah', namun dengan memperlihatkan adanya cerita lain yang lebih membawa pembaca untuk menggugah sisi kemanusiaannya.

d. Jurnalis menyoroti akibat kekerasan yang tidak terlihat seperti trauma

dan demam kemenangan dan kehancuran struktur masyarakat dan budaya

Dalam konflik, pasti selalu ada pihak yang mendapatkan 'dampak' dari konflik yang terjadi. Termasuk pula pihak-pihak yang digambarkan menjadi korban dari kejadian aksi massa penolakan hasil Pemilihan Presiden 2019 tanggal 21-22 Mei 2019 lalu. Pihak Badan Pemenangan Nasional menolak hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden 2019 dan berbuntut panjang dengan hadirnya aksi massa yang disusupi perusuh. Akibatnya, kerusuhanpun tidak dapat dihindari. Dari kerusuhan ini, tergambarkan beberapa pihak yang mendapat kerugian dari kerusuhan ini.

Pertama, korban fisik yang diderita oleh peserta aksi massa dan aparat keamanan. Sebagian besar dari korban yang terluka akibat kerusuhan menderita luka tembak peluru karet, lemparan batu, sesak nafas, dan perih akibat gas air mata. Penggambaran korban ini tidak secara eksplisit disampaikan dalam 1 berita khusus namun terselip dalam berita yang berjudul "Kemanusiaan: Mereka yang Gigih Memberi Pertolongan". Dalam berita ini diceritakan bagaimana sukarelawan membantu korban yang terluka selama kerusuhan.

Kedua, korban non fisik atau kerugian secara finansial. Kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 terpusat di beberapa daerah di Jakarta, termasuk daerah Tanah Abang. Kekhawatiran akan adanya demo yang lebih besar membuat pihak pengelola Pasar Tanah Abang menutup sementara aktivitas perekonomian di Pasar Tanah Abang. Akibat dari penutupan pasar ini, ribuan buruh kasar tidak dapat bekerja selama 2 hari, pedagang menjadi tidak mendapatkan pendapatan, dan reseller menjadi kesulitan untuk mendapatkan barang yang akan dijual kembali. Bila

dihitung, total kerugian di Pasar Tanah Abang mencapai 2 triliun. Kerusakan ini juga membuat aktivitas perkantoran dan pendidikan di Jakarta terpaksa diliburkan sementara untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar.

Hal-hal yang terkadang dilupakan oleh pihak yang berkonflik adalah adanya pihak kecil yang terkena dampak kerusakan. Media massa sebagai pembentuk opini masyarakat sudah selayaknya mengulik sisi-sisi yang sering dilupakan pada saat konflik. Hendri, Wakil Ketua Dewan Pers, turut menyampaikan bahwa media massa yang menggunakan perspektif jurnalisisme damai akan mengingatkan kepada aktor-aktor yang berkonflik bahwa ada pihak-pihak yang menderita akibat kerusakan, tidak hanya korban yang terluka namun juga dampak dari aspek kehidupan lainnya.

a. Berorientasi pada proses resolusi konflik

Poin ini seakan menjadi ciri khas dari jurnalisisme perdamaian. Jurnalis dapat memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang tidak hanya terjadi di tempat dan waktu yang sama dengan kejadian kekerasan. Masih banyak kejadian-kejadian kecil yang patut diperhitungkan untuk membangun perdamaian serta melihat sebab dan akibat di berbagai tempat dan waktu. Jurnalis dapat menelusuri sejarah konflik sebagai dokumen pendukung penyelesaian konflik.

Puncak dari konflik Pemilu 2019 yang panjang adalah kerusakan penolakan hasil rekapitulasi Pilpres 2019. Di sini, Kompas memperlihatkan perhatiannya untuk proses resolusi konflik. Pertama, pada berita tanggal 21 Mei 2019 dalam judul berita “Rekapitulasi Tuntas” dimana di dalamnya terdapat harapan rekonsiliasi yang diinginkan oleh beberapa tokoh selepas konflik panjang

Pilpres 2019. Dalam berita dituliskan bahwa momentum tuntasnya rekapitulasi hasil pemilihan presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019 diharapkan bisa diikuti dengan upaya peserta pemilu menginisiasi upaya rekonsiliasi. Hal ini sangat penting untuk menurunkan tensi politik di masyarakat. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana di Jakarta mengatakan peta dukungan pada Pemilu 2019 menunjukkan kondisi pembelahan politik dan sosial di masyarakat semakin kukuh. Dalam konteks itu, upaya rekonsiliasi perlu segera dilakukan pasca penetapan hasil pemilu. Hal itu dapat diwujudkan lewat pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. “Kuncinya bagaimana pihak yang menang dan kalah bisa saling bertemu, berangkul, dan sama-sama menerima hasil pemilu,” kata Aditya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, mengingatkan persatuan dan kesatuan bangsa terlalu mahal untuk dirusak kontestasi politik. Oleh karena itu, elite politik yang menang dan kalah perlu kembali menjalin komunikasi dan bekerja sama. Menurut dia, pihak yang kalah sepatutnya legawa dan secara terbuka menyatakan kealahannya. Sementara pihak yang menang sepatutnya tidak jumawa, serta perlu merangkul rival politiknya guna merekatkan lagi persatuan bangsa.

Harian Kompas berupaya menyisipkan harapan rekonsiliasi dari sejumlah elit politik di setiap berita yang bernuansa kerusakan pasca perhitungan suara. Puncaknya di headline tanggal 24 Mei 2019 Harian Kompas menuliskan tentang upaya rekonsiliasi yang dirajut oleh elit politik yang tengah melakukan lobi-lobi politik. Selain itu, upaya perdamaian di tingkat bawah juga diperlihatkan pada berita “Kemanusiaan: Mereka yang Gigih Memberikan

Pertolongan”. Dalam konflik seringkali yang terlihat hanya kawan dan lawan, ada pihak yang berada di jalan tengah yang sebenarnya tengah mengupayakan perdamaian di antara keduanya yakni sukarelawan kemanusiaan. Meski tidak secara eksplisit menampilkan bahwa mereka tengah mengupayakan perdamaian, namun dengan memberikan pertolongan kemanusiaan sebenarnya mereka telah menawarkan perdamaian. Setidaknya untuk menurunkan tensi.

Indikator damai menurut Harian Kompas ialah bahwa tidak semua konflik yang meluas berarti tidak ada perdamaian di dalamnya. Bisa saja ada pihak-pihak yang tengah mengupayakan perdamaian. Sehingga kata damai dan konflik ini bukan dua hal yang terjadi dalam waktu yang berbeda namun bisa terjadi berbarengan dalam situasi yang bersamaan. Kebanyakan media memotret konflik saja dan tidak menampilkan adanya masyarakat yang bisa bergandengan tangan saat terjadi konflik. Sehingga perdamaian bisa dimaknai sebagai upaya merajut kebersamaan untuk mengurangi ketegangan konflik.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa Harian Kompas telah melaksanakan jurnalisme perdamaian dengan perspektif menjaga persatuan Indonesia pada pemberitaan kerusuhan pasca kerusuhan 21-22 Mei 2019. Cara Harian Kompas bercerita tentang kejadian kerusuhan lebih banyak dengan tidak menceritakan kejadian secara kronologis dan membalut cerita kemanusiaan dengan cara *feature*. Harian Kompas menggunakan struktur narasi yang menampilkan upaya menuju keseimbangan atau resolusi konflik terlebih dahulu.

Nilai yang terinternalisasi di organisasi Kompas adalah nilai demokrasi dan persatuan Indonesia sehingga rapat redaksi selalu mengarahkan pada dua hal tersebut dalam mengambil *angle* berita kerusuhan Indonesia. Sudah selayaknya negara Indonesia yang berdiri atas dasar perbedaan yang menjadi satu ini harus terus dijaga.

Dalam penelitian ini mengulas bagaimana jurnalisme perdamaian diterapkan tidak hanya di Harian Kompas namun juga dinamikanya di Indonesia. Ada sebuah konsep jurnalisme perdamaian “Menjaga Persatuan Indonesia” yang berorientasi pada pencegahan disintegrasi bangsa dan tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, konsep jurnalisme perdamaian yang menjaga persatuan Indonesia ini harus terus dikembangkan dan dikontekstualkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang penuh keberagaman. Jurnalisme perdamaian menjaga persatuan ini mengedepankan kepentingan negara dan berorientasi terhadap kepentingan nasional dan keamanan bangsa.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdilah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesia: Penerbit Yayasan INDONESIA TERATA. Hal 16
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Freedman, D. 2008. *The Politics of Media Policy*. Cambridge: Polity Press.

Lynch, Jake & McGolrick. 2005. *Peace Journalism*. Gloucestershire: Howthorn Press.

Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia.

McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail Buku 1 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Humanika.

Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pruitt, Dean G, Jeffrey Z Rubin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudibyo, Agus dkk. 2001. *Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: ISAI.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Watson, James. 1996. *Media Communication: An Introduction to Theory and Process*. London: Macmillan Press.

### Jurnal

Lynch, Jake. 2007. "A Course in Peace Journalism". *Conflict & Communication Online*, Vol.6, No. 1.

Nuswantoro, A Ranggabumi. 2013. "Media Massa dalam Situasi Konflik: dari Bandwagon Effect sampai Peace Narrative". *Jurnal Komunikasi Volume 1 no 6 edisi Januari 2013*. Halaman 503-516

Syas, Mulharnetti. 2015. "Konstruksi Realitas Pemberitaan tentang Konflik Indonesia-Malaysia di Surat Kabar Media Indonesia". *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 13 no 2 tahun 2015*.

### Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

### Website

Chasani, Ichwan. 2018. Koran Warta Kota Raih Peringkat 7, Media Cetak Berbahasa Indonesia Terbaik 2018. Diakses dalam laman <https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/10/koran-warta-kota-raih-peringkat-7-media-cetak-berbahasa-indonesia-terbaik-2018> pada tanggal 8 Desember 2019.

Kompas. 2019. Kompas TV Harian Kompas Kompas Com Luncurkan Rumah Pemilu. diakses dari <https://www.kompas.tv/article/30174/kompastv-harian-kompas-kompas-com-luncurkan-rumah-pemilu> pada tanggal 10 Mei 2019.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. 2019. Yang Perlu Diketahui Seputar Kerusuhan 21-22 Mei Sejauh ini. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4561198/yang-perlu-diketahui-seputar-kerusuhan-21-22-mei-sejauh-ini> pada tanggal 27 Mei 2019.

RG. 2019. Jelang Pemilu 2019, Televisi dan Radio Dominan Siarkan Isu Pilpres. Diakses dari laman <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34998-jelang-pemilu-2019-televisi-dan-radio-dominan-siarkan-isu-pilpres> pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 08.32 WIB.